

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ikhsan¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan program pengembangan UMKM dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan program pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupten Kutai Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari penggambaran objek dan gejala-gejala yang diteliti. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa program pengembangan dan efektivitas program bantuan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dimana terdapat 2.550 pelaku usaha yang berada di bawah bimbingan Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur. Meskipun mengalami penurunan jumlah sebagai dampak dari pelemahan sektor ekonomi secara nasional. Salah satu program unggulan yaitu pendampingan dan bantuan kredit modal dengan bekerja sama pihak Bank konvensional. Sedangkan faktor kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur di antaranya adalah permasalahan geografis wilayah yang terlalu luas, dimana hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang ada. Pada sisi lain, salah satu faktor kendala yang berhasil dianalisa adalah stigma masyarakat yang masih memandang sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai sektor yang kurang bernilai ekonomis. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan akses informasi dan geografis wilayah yang secara garis besar mempengaruhi pangsa pasar dan jalur distribusi bahan baku maupun produk hasil olahan para pelaku usaha di sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci : *UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kabupten Kutai Timur.*

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ikhsanganteng@gmail.com

menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang, Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalannya yaitu salah satunya dengan melakukan pembangunan dibidang ekonomi dan industri. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan utamanya mewujudkan stuktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan nasional yang mengambil konsep dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam menentukan peran individu manusia sebagai subyek dalam menciptakan tingkat partisipasi masyarakat pada proses pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan nasional ini proses pembangunan dikembalikan kepada individu masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses. Pembangunan sebagai suatu proses yang multidimensi memiliki makna yang cukup luas antara lain yaitu perubahan struktur sosial, lembaga-lembaga nasional maupun lokal, sikap-sikap masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 sektor UMKM merupakan sektor yang tangguh dan berdaya tahan prima terhadap terpaan badai krisis, karena UMKM memiliki tingkat adaptasi yang tinggi sehingga ketika terjadi perubahan akan cepat menyesuaikan diri. Pemerintah kemudian menyadari akan pentingnya pengembangan kegiatan UMKM yang dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini karena UMKM merupakan langkah awal dari perwujudan kewirausahaan yang terbentuk dan merupakan salah satu kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Usaha kecil dan menengah mampu mempertahankan keberadaannya di tengah gempuran krisis nasional tidak lantas mengurangi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Salah satu kendala yang dihadapi dalam hal permodalan. Bagi usaha kecil dan menengah, kredit dirasa cukup penting meningkatkan kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja, yang diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi penumpukan modal kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi, yaitu kredit usaha rakyat (KUR).

Ditingkat Kabupaten Kutai Timur, dilihat bahwa secara pertumbuhan perekonomian mengalami peningkatan. Tetapi Hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Timur beberapa tahun terakhir ini dimana pertumbuhan UMKM mengalami penurunan yang cukup jauh, dimana pada tahun 2014 jumlah total UMKM yang ada 2.978 sedangkan menurun di tahun 2015 sebesar 428 hingga menjadi 2.550 yang

tersisa di Kabupaten Kutai Timur. Penurunan itu tak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak menjalankan pelaksanaan program UMKM dengan maksimal sebagai dinas pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola dan membina UMKM wilayah Kutai Timur.

Perkembangan UMKM di wilayah Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah keseluruhan hanya ada dua dari lima Kecamatan yang mengalami peningkatan yaitu kecamatan Sangkulirang dan Kombeng. Data tersebut mengindikasikan pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kabupaten Kutai Timur belum berjalan efektif sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM.

Dari alasan yang dikemukakan diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Timur”**

Kerangka Dasar Teori

Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik merupakan aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Didalam dunia pemerintahan tentu ada yang disebut dengan kebijakan publik yang dimana dalam sebuah kebijakan tersebut akan dijalankan oleh pemerintah kota, provinsi, ataupun Negara Agar mengetahui lebih jelas tentang kebijakan publik, maka berikut adalah beberapa para ahli yang mengemukakan tentang kebijakan publik.

Pengertian Kebijakan

Carl J Federick (dalam Leo Agustino 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Budi Winarno (2007:15) istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2007:145) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur,

karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Sementara Menurut Woll (dalam Tangkilisan 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (dalam Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: “Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan”

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Untuk mengetahui lebih lanjut maka berikut adalah beberapa uraian tentang konsep Efektivitas.

Pengertian Efektivitas

Menurut Agung Kurniawan (2007:47) Pengertian efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Martani dan Lubis (2006:78) efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Efektivitas

Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum (dalam Richard 2007:36) yang berargumentasi bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada sarana dan tujuan organisasi, daripada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas, dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha produktif yang baik itu berdiri sendiri ataupun badan usaha. Yang dimana UMKM adalah usaha yang biasanya dimiliki orang perseorangan. Untuk mengetahui lebih detail tentang UMKM maka berikut adalah uraian tentang UMKM.

Efektivitas Pemberdayaan UMKM

Dijelaskan oleh Steers (dalam Tangkilisan, 2005:141) bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya Strers (dalam Tangkilisan 2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu Produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, Kepuasan kerja, Kemampuan ber laba, Pencarian sumber daya.

Dilihat dari pengertian efektivitas dan pemberdayaan, maka efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pengukuran upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Jadi pendekatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang

ikut menentukan masa depan dan kehidupan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berpedoman pada jenis penelitian ini tersebut, dengan maksud untuk menggambarkan hasil dari gejala-gejala yang dilihat serta diamati.

Sesuai dengan tujuan pengujian mengenai deskriptif atau penggambaran ataupun menuliskan tentang efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikrokecil menengah pada Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur..

1. Efektivitas Pelaksanaa Program PengembanganUMKM :
 - a. Produksi
 - b. Efisiensi
 - c. Kepuasan
 - d. Keadaptasian
 - e. Kelangsungan Hidup
2. Faktor-faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program UMKM Dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian

Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabuapten Kutai Timur telah memberikan akses kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan dunia usahanya di sektor Koperasi, UMKM maupaun ekonomi kreatif terkait pembinaan, peningkatkan *skill* dan *soft-knowledge* tanpa ada persyaratan khusus yang harus di penuhi. Artinya asalkan ada kemauan atau inisiasi yang konstruktif dari para pelaku dunia usaha maka Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur siap untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Akan tetapi jika mengajukan permohonan bantuan pendanaan atau bantuan kredit modal di serahkan kepada pihak institusi Bank selaku instrumen lembaga keuangan resmi Republik Indonesia dimana ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi yang sudah di tetapkan oleh pihak Bank yang menjadi rekanan kerja sama. Pemberian kredit ini pun mempunyai ketetapan tersendiri yang di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana disebutkan dalam satu pasal bahwa pihak Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM dengan jumlah rasio pemberian kredit paling

rendah sebesar 20% yang di hitung dari rasio kredit atau pembiayaan terhadap total kredit atau pembiayaan yang di berikan.

Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur pada point ini secara khusus memberikan wewenang kepada Bank BPR (Bank Pengkreditat Rakyat) sebagai instrumen keuangan yang mengatur masalah pembiayaan atau pemberian kredit atau modal bagi Koperasi, UMKM maupun Ekonomi Kreatif yang mengajukan permohonan bantuan pendanaan atau kredit modal usaha.

Dari hasil wawancara penelitian dapat di ketahui bahwa adanya kesenjangan antara beban tugas yang diberikan terhadap jumlah tenaga teknis lapangan yang berasal dari internal Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan para pelaku usaha. Hal ini menjadi acuan utama peneliti dalam memahami kendala dan permasalahan dalam penelitian terkait efektifitas program dari Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur.

Pada dasarnya pekerjaan utama yang harus di lakukan adalah merubah pola pikir dan sudut pandang para pelaku dunia usaha sektor koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Kutai Timur agar dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang pesat dengan memaksimalkan sistem manajemen baik dalam hal produksi (pengolahan dan *packaging*) pemasaran dan distribusi. Karena pada kenyataannya sektor koperasi, UMKM maupun ekonomi kreatif adalah sektor usaha yang telah terbukti mampu mendongkrak kemampuan ekonomi masyarakat secara merata dan mendongkrak PAD suatu daerah jika para pelaku usaha dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi yang berkembang pesat saat ini.

Jika mengacu pada UU. No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk menumbuh-kembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, peran UMKM tersebut memiliki posisi yang strategis dan penting serta meninjau pada hasil wawancara terstruktur bersama informan, maka secara konseptual pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif dapat di lakukan dengan mengoptimalkan sistem pemberdayaan para pelaku dunia usaha UMKM dan Ekonomi Kreatif secara mandiri. Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada tingkat partisipasi para pelaku usaha maupun stakeholder lain yang turut berperan dalam sistem permodalan, pengembangan alih teknologi dan pemasaran. Pengembangan UMKM tersebut harus sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan, dalam hal ini terutama permasalahan ketersediaannya bahan baku dan tenaga kerja yang handal terlatih, sedangkan pemerintah dapat mengambil peran dalam pengenalan dan penyediaan pasar yang lebih luas melalui pelaksanaan pameran hasil produksi UMKM dan Ekonomi Kreatif maupun penarikan investor dengan memberikan stabilitas kondisi pasar dan alur distribusi hasil produksi.

Dengan melibatkan para pelaku usaha untuk lebih partisipatif maka terbangun sebuah sistem yang bersifat *bottom-up* dan tidak lagi mengandalkan pendampingan dari pemerintah atau secara *top-down*.

Pada hasil wawancara yang didapatkan melalui informan-informan penelitian, serta menyesuaikan dengan kajian teoritis yang di lakukan peneliti dapat di tarik kesimpulan Hasil bahwa pengembangan dan efektifitas program UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur harus di bangun secara partisipatif dan diperkaya dengan adanya pusat pengkajian, analisis dan permodelan pusat pembelajaran (*learning site*) kepada para pelaku usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Hal ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangannya jumlah tenaga pendamping profesional dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur.

Sementara itu, beberapa point penting yang harus di maksimalkan untuk mencapai efektifitas program pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur jika berdasarkan kompilasi hasil wawancara yang sudah di lakukan tersebut maka langkah yang dapat di lakukan adalah meningkatkan kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan dengan adanya *learning site* yang di canangkan tersebut. Kemudian memeperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UMKM dan Pengembangan UMKM agar semakin inovatif sehingga para pelaku usaha tidak terbatas lagi oleh penggunaan tekonologi yang tradisional namun juga dapat dilakukan secara modern dan meningkatkan hasil produksi serta menekan biaya yang di butuhkan. Lalu selanjutnya adalah dengan memfasilitasi UMKM berkaitan akses informasi dan promosi dengan panga pasar dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pasar yang dapat di jangkau oleh para pelaku usaha sehingga tidak hanya berpatokan pada pasar domestik daerah saja, namun dapat merambah pada pasar nasional bahkan international.

Jika mengacu pada rujukan fokus penelitian yang di lakukan, dimana efektifitas pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kabupaten Kutai Timur ini mencakup pada beberapa hal, yaitu :

1. Produksi

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, juga berdasarkan data kajian pustaka yang dilakukan di ketahui bahwa produktivitas sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Pada pameran Pekan Raya Expo Kutai Timur tahun 2015 di mana merupakan salah satu program pengembangan dan pembinaan Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur dimana kegiatan ini sebagai ajang membuka pangsa pasar dan mengedukasi masyarakat luas terkait peran serta sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif terhadap pembangunan daerah dan sumber mata pencaharian mandiri. Hasil produksi yang di pamerkan pada gelaran ini tidak lagi sebatas produk rumahan namun juga sudah merambah ke sektor teknologi sederhana. Hal ini juga dapat

di lihat dari adanya peningkatan yang signifikan di beberapa kecamatan utama seperti Sangkulirang, Sengatta selatan, dan Kongbeng. Pada faktor produksi UMKM dan Ekonomi Kreatif, Program pendampingan dan binaan Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur meningkatkan kualitas sarana dan prasarana produksi para pelaku usaha. Hal ini membuahkan hasil dari meningkatnya kualitas hasil produksi serta meningkatkan promosi produk koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di sentral-sentral daerah maupun nasional. Bahkan pada gelaran B-CTI yang mempunyai skala nasional yang di selenggarakan oleh BPTSP-PMD, Stand pameran Dinas Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur meraih juara 1 sebagai Stand Promosi Terbaik Tahun 2016. Pameran ini di ikuti setidaknya oleh 34 Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota secara nasional. Hal ini diharapkan dapat menarik investor dan pangsa pasar yang lebih luas.

Jika di lihat dari hasil penelitian berdasarkan data dan pengawasan lapangan peneliti mencoba menggunakan teori Tampubolon (dalam Ismail Nawawi 2006:126) untuk melihat kriteria efektivitas yang dilihat dari produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi dalam hal ini keluaran utama organisasi Dinas Koperasi yaitu kebijakan dan program pengembangan usaha dan pelaku usaha UMKM berbanding lurus dengan keluaran utama para pelaku usaha UMKM yaitu keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya

2. Efisiensi Program

Efisiensi pelaksanaan program dapat dilihat dari tercapainya target kerja yang telah di tetapkan dengan melihat jumlah UMKM dan Ekonomi Kreatif yang ada. Strategi yang di terapkan oleh SKPD terkait dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Titik tolak pengukurannya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat di kembangkan. Potensi inilah yang kemudian di kembangkan dan di jadikan motivasi dan pendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya jiwa wirausaha sebagai langkah perbaikan struktur ekonomi masyarakat.
- *Empowering*, dimana potensi yang dimiliki tersebut di perkuat dengan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penciptaan iklim atau suasana usaha yang positif akan mendorong terciptanya masukan input serta pembukaan akses dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang ada. Dalam rangka pemberdayaan ini target pokok adalah meningkatnya taraf pendidikan dan keahlian dalam

mengembangkan usaha termasuk didalamnya pengembangan prasarana fisik seperti perbaikan jalan, listrik, alih teknologi pengolahan serta keahlian individual para pelaku usaha. Dinas Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini mampu menyediakan wadah-wadah pembelajaran peningkatan skill dan pengetahuan serta keahlian para pelaku usaha sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Adapun peneliti mencoba menghubungkan dengan teori untuk melihat hubungan hasil penelitian dan teori yang menjadi acuan peneliti Tampubolon (dalam Ismail Nawawi 2006:126) menyebutkan bahwa efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi dan hasilnya adalah di temukannya hubungan antara program pengembangan potensi masyarakat terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dalam mewujudkan tujuan utama dari kebijakan.

3. Tingkat Kepuasan

Tercapainya indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program dapat di lihat dari jumlah peningkatan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah naungan binaan SKPD terkait dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang di dapatkan, secara keseluruhan terdapat 5.6% peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Lebih jauh lagi, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap program pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif di tandai dengan tingginya harapan terhadap keberhasilan usaha. Dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur secara rutin menggelar pameran atau *expo* baik di tingkat daerah maupun bekerja sama dengan instansi tingkat nasional untuk mengikuti gelaran tingkat nasional. Langkah ini dilakukan untuk mendukung terciptanya suasana usaha yang kondusif tersebut, dengan tercapainya pangsa pasar yang lebih luas maupun terjadinya alih teknologi yang lebih modern dengan berkaca pada pelaku usaha dari daerah lain.

Dari pembahasan hasil penelitian peneliti mencoba mencari hubungan hasil penelitian dengan teori dengan tingkat kepuasan menurut pendapat Tampubolon (dalam Ismail Nawawi 2006:126) menyebutkan kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal dapat di lihat dari meningkatnya jumlah UMKM dan Ekonomi Kreatif yang ada di bawah naungan binaan SKPD yang di tandai dengan tingginya harapan terhadap keberhasilan usaha yang terus di dukung suasana usaha yang kondusif hingga tercapainya pangsa pasar yang lebih luas dan terjadinya alih teknologi yang lebih moderen.

4. Tingkat Adaptasi dan Kelangsungan Hidup UMKM

Adanya perlindungan atau *protecting* terhadap pelaku usaha dengan arti memberdayakan dan melindungi kelangsungan usaha tersebut. Dalam proses pemberdayaan tersebut harus dicegah kondisi yang lemah semakin lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Pemberdayaan tersebut mengacu pada artian tidak menjadikan masyarakat pelaku usaha menjadi ketergantungan dengan program pemberian (*charity*) namun mengarahkan para pelaku usaha untuk mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman dan persaingan bisnis dengan pelaku bisnis yang berbasis korporat. Salah satu langkah yang di tempuh oleh SKPD terkait adalah dengan menjalin kerja sama dengan Bank Konvensional dalam hal pemberian kredit pinjaman modal usaha yang berbungan rendah serta peningkatan kemampuan teknologi pengolahan dalam hal produksi barang. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan jaringan usaha di mana para pelaku usaha tidak hanya berinteraksi dengan sesama pelaku usaha di daerah saja namun di dorong untuk dapat berinteraksi dengan para pelaku usaha dari daerah lain. Hal ini juga dapat di capai dari pelaksanaan gelaran pameran dan sebagainya, sehingga dengan terjalannya sebuah jaringan usaha yang lebih luas di harapkan dapat membuka wawasan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sendiri. Pada sisi lain, kemampuan adaptasi usaha dan keberlangsungan hidup UMKM juga dapat tercapai dengan peningkatan daur hidup produk usaha yang dihasilkan, kemampuan memobilisasi modal, memanfaatkan sumber daya alam, menciptakan pasar dan mempertahankan bisnis yang ada. Kombinasi dari kemampuan tersebut akan mampu meingkatkan kapasitas produksi untuk menafaatkan kesempatan menjadi kegiatan yang menguntungkan sehingga orientasi dan motivasi pelaku usaha dapat terus di rangsang menuju pelaku usaha yang mandiri. Berdasarkan data yang didapatkan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kuta Timur Tahun 2016 – 2021 dimana di targetkan presentasi pertambahan UMKM yang di bina tidak kurang dari 4%. Hal ini menunjukkan optimisme dari pelaksanaan program pemberdayaan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha UMKM dapat bertahan dan mampu beradaptasi sehingga keberlangsungan hidup usaha dapat terjamin.

Mengacu pada hasil penelitian diatas penulis mencoba mengukur tingkat keadaptasian dan kelangsungan hidup menurut Tampubolon (daalam Ismail Nawawi 2006:126) Menyebutkan keadaptasian sebagai kreteria efektifitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal dan kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab

organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar terhadap apa yang terjadi pada tempat penelitian karena program pengembangan memiliki perlindungan atau *protecting* terhadap pelaku usaha dalam arti memberdayakan dan melindungi kelangsungan usaha tersebut, memberdayakan dan mengembangkan kemampuan para pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan persaingan pasar yang kuat.

Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan pada Hasil kajian dan kompilasi data wawancara penelitian, maka di ketahui faktor-faktor penghambur program pengembangan UMKM di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Teknis yang di miliki Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur.
2. Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur atau jarak tempuh antar wilayah Perkotaan ke Perdesaaan atau antar Desa, sehingga pada pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan.
3. Penurunan motivasi untuk berwirausaha dari pada pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif karena di sebabkan nya iklim usaha yang kurang mendukung. Masyarakat lebih memilih menjadi karyawan swasta terutama di sektor pertambangan batu bara dan perkebunan sawti maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di sebagian besar wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur.
4. Kurangnya daya saing dari barang hasil produksi dengan kompetitor sejenis maupun substitusi dari wilayah lain. Hal ini juga merupakan dampak atas tidak terbina dan minimnya supervisi pengawasan dan pengembangan softskill pengolahan dari instansi terkait terhadap para pelaku usaha.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Efektifitas pelaksanaan program pengembangan UMKM yang di lakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Dari sektor produksi, berdasarkan data usaha UMKM yang didapatkan peneliti setidaknya terdapat 2.550 para pelaku usaha pada tahun 2015 yang tersebar di lima kecamatan Kabupaten Kutai Timur. Jumlah ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2014 di mana terdata sebanyak 2.978 para pelaku usaha yang di sinyalir sebagai dampak dari pelemahan ekonomi nasional terhadap kondisi global. Jika melihat dari segi efisiensi program, maka di ketahui bahwa program pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai

Timur di dukung sepenuhnya oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur dengan berbagai bentuk program pengembangan dan pendampingan seperti bantuan pembinaan dan teknologi penunjang usaha. Pada sistem kredit permodalan, Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur berkerja sama dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengikuti acuan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk mendukung program pengembangan sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif tersebut jumlah pemberian kredit paling rendah sebesar 20% dari rasio kredit atau total kredit yang diberikan agar dapat meringankan pihak pelaku usaha. Berkaca pada tingkat peningkatan sebesar 5.6% dari tahun 2014 hingga tahun 2015 maka dapat di simpulkan bahwa tingkat kepuasan para pelaku usaha terhadap program yang di galakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur tercapai. Adanya pengembangan alih teknologi dan program studi banding terhadap daerah lain baik melalui gelaran expo/pameran hasil produksi maupun ajang sosialisasi lainnya turut membantu pengembangan tingkat adaptasi dan kelangsungan hidup para pelaku usaha. Salah satu cara yang di lakukan adalah menggandeng pihak Bank Konvensional dan Bank Daerah dalam satu paker kebijakan dalam hal pembiayaan modal dan pengembangan usaha bagi para pelaku usaha.

2. Faktor-faktor penghambat pengembangan dan efisiensi program pengembangan Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur adalah pada beberapa point sebagai berikut :
 - Jumlah Tenaga Teknis yang di miliki Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur.
 - Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur atau jarak tempuh antar wilayah Perkotaan ke Perdesaaan atau antar Desa, sehingga pada pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan.
 - Penurunan motivasi untuk berwirausaha dari pada pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif karena di sebabkan nya iklim usaha yang kurang mendukung serta stigma negatif masyarakat terhadap kelangsungan hidup para pelaku usaha.
 - Kurangnya daya saing dari barang hasil produksi dengan kompetitor sejenis maupun substitusi dari wilayah lain. Hal ini juga merupakan dampak atas tidak terbina dan minimnya supervisi pengawasan dan pengembangan softskill pengolahan dari instansi terkait terhadap para pelaku usaha.

Saran

1. Adanya peningkatan jumlah Sumber daya manusia baik secara internal jika memungkinkan adanya alokasi tambahan pegawai negeri sipil dari rekomendasi daerah ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi terkait jumlah tenaga teknik bagian pendampingan dan pengawasan program. Hal ini di lakukan sebagai solusi atas kondisi geografi Kabupaten Kutai Timur serta jumlah pelaku usaha UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur.
2. Adanya sosialisasi mengenai prosedur mengajukan pinjaman kepada pihak Bank rekanan yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur terkait bantuan permodalan kepada para pelaku usaha.
3. Adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada para agen UMKM dan Ekonomi Kreatif kepada masyarakat untuk membuka pangsa pasar yang lebih luas serta menarik minat para masyarakat untuk menjadi pelaku usaha.
4. Adanya penyelenggaraan gelaran pameran hasil produksi pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif serta studi banding ke daerah lain dalam rangka meningkatkan tingkat pengetahuan dan mensosialisasikan hasil produksi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Dinas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur.

Daftar Pustaka

- Agustina, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2009. *PILKADA dan Dinamika Politik Lokal*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasional Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Rakyat : Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosisal dan Pekerja Sosisal*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Fikiran*
- Wahab, Shalihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Askara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpres.